Jurnal Inovasi Global
Vol. 2, No. 12, December, 2024
ISSN: 3031-0512 ; E-ISSN: 3032-2723
https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PANTAI MUNGGU MENUJU DESA WISATA

I Wayan Putra Irawan[1], I Wayan Runa[2], Agus Kurniawan[3]
Universitas Warmadewa, Indonesia
iwayanputrairawan@gmail.com

Abstrak:

Pantai Munggu merupakan objek wisata alam terletak di Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 200/041/HK/2022 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata. Dengan ditetapkannya Pantai Munggu sebagai destinaasi wisata diharapkan dapat memberikan peluang pada masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pariwisata. Pantai ini memiliki potensi wisata yang besar, namun masih belum terkelola secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan potensi wisata. Pengembangan infrastruktur Pantai Munggu meliputi penyediaan sarana dan prasarana wisata, seperti jalan akses, tempat parkir, toilet, gazebo, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, juga diperlukan pengembangan potensi wisata alam dan budaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan infrastruktur di pantai munggu belum optimal, masih ada yang perlu di perbaiki dari masing-masing komponen tersebut untuk menuju desa wisata.

Kata Kunci: pengembangan infrastruktur, desa wisata, pengembangan pariwisata

Abstract:

Munggu Beach is a natural tourist attraction located in Munggu Village, Mengwi District, Badung Regency which was designated based on Badung Regent Decree Number 200/041/HK/2022 concerning Determining Tourist Attractions. By establishing Munggu Beach as a tourist destination, it is hoped that it will provide opportunities for the community to utilize existing potentials to support the sustainability of tourism activities. This beach has great tourism potential, but it is still not managed optimally. Therefore, infrastructure development is needed to increase tourism potential. Munggu Beach infrastructure development includes the provision of tourist facilities and infrastructure, such as access roads, parking lots, toilets, gazebos and other supporting facilities. Apart from that, it is also necessary to develop natural and cultural tourism potential. The research method uses a qualitative descriptive

approach. The technique for determining informants uses purposive techniques. Data collection techniques use interview, observation and documentation techniques. The research results show that infrastructure development at Munggu Beach is not yet optimal, each component still needs to be improved to lead to a tourist village.

Keywords: *infrastructure development, tourist villages, tourism development*

Pendahuluan

Pengembangan industri pariwisata dan pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata menjadi kegiatan ekonomi yang mendukung pendapatan daerah, meningkatkan kesempatan kerja, membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat, dan mendorong pembangunan daerah (Huda, 2020; Manthofi & Aisyah, 2024; Nurhajati, 2018). Oleh karena itu, pariwisata memegang peran yang sangat penting di Indonesia, terutama di Bali. Potensi pariwisata di suatu kawasan atau daerah harus diimbangi dengan pengembangan pasar pariwisata yang terus meningkat. Pemerintah menyediakan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah. Infrastruktur memengaruhi lingkungan sekitar dan kualitas pariwisata, sehingga memiliki peranan penting dalam mendukung industri pariwisata serta pembangunan daerah .

Kabupaten Badung kini memiliki beragam objek wisata pantai. Salah satunya adalah Pantai Munggu, yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung (Sunarjaya et al., 2018). Pantai Munggu dikenal juga dengan sebutan "matahari senja". Pantai ini cocok untuk berselancar karena memiliki ombak yang besar dan antrean panjang para peselancar. Pengelola pantai menyediakan fasilitas seperti lapangan voli, warung, dan kafe untuk pengunjung. Namun, meskipun Pantai Munggu memberikan banyak keuntungan, pemerintah dan pengelola perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya di bidang pelayanan parkir. Setiap hari, area pantai dipenuhi kendaraan yang parkir hingga mengganggu kenyamanan pengunjung.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun prasarana penunjang pariwisata yang berbasis pada keunggulan Pantai Munggu untuk mengembangkan potensi pariwisata di kawasan tersebut.

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara, dan ruang di dalam bumi, yang merupakan satu kesatuan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup, bekerja, dan berkembang (Nomor, 11 C.E.). Sistem penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan komponen dalam penataan ruang, yang juga mencerminkan pola dan organisasi ruang.

Secara umum, undang-undang tata ruang dapat dilihat sebagai hukum yang mengatur proses, pertimbangan, tata cara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Ridwan & Achmad Sodik, 2023; Ulenaung, 2019). Dalam bukunya Introduction to Spatial Planning Law, Yunus menyatakan bahwa perencanaan tata ruang berfungsi sebagai alat untuk mengawasi lingkungan dan pembangunan, khususnya untuk meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peraturan perundang-undangan tata ruang di Indonesia telah menguat sebagai peraturan dalam terminologi hukum formal. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional merupakan dokumen hukum resmi yang telah disetujui.

Menurut Azizah (2017), perencanaan pembangunan desa adalah kerangka kerja atau model yang bertujuan menyelidiki kemungkinan dan konsep pembangunan desa dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses .

Dalam rangka membina pembangunan nasional, Sondang P. Siagian (2001) mengartikan pembangunan sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan disengaja, menuju arah modernitas.

Menurut Andin (2024), pembangunan adalah serangkaian tindakan yang disengaja dan terencana yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan menuju arah yang lebih baik.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014), istilah "pembangunan" berbeda dengan modernisasi dan belum memiliki kesepakatan definisi. Upaya negara untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan disengaja menuju modernitas umumnya disebut pembangunan. Pembangunan juga berupaya mengubah paradigma atau gaya berpikir masyarakat dari konvensional menjadi modern. Oleh karena itu, Tjokroamidjojo menyatakan bahwa hakikat pembangunan adalah suatu proses yang harus dilalui suatu bangsa untuk mencapai tujuannya.

Menurut Joseph J. Spengler dalam Listyaningsih (2014), pembangunan diartikan sebagai peningkatan kenikmatan hidup. Pembangunan dapat mencakup aspek politik atau ekonomi. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan produksi barang dan jasa. Joseph juga menyatakan bahwa banyak analis politik lebih berfokus pada aspek pertumbuhan politik. Dilihat dari tujuannya, pertumbuhan politik diarahkan untuk mencapai demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi, dan tujuan-tujuan lainnya. Sementara itu, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam kesehatan dan pendidikan, sekaligus mendorong stabilitas politik serta kemajuan ekonomi yang cepat.

Menurut Siahaan (2012), tujuan dasar pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara keseluruhan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, menurut Riva'i (2016), pembangunan merupakan proses linier yang berkembang dari peradaban primitif menuju peradaban yang lebih canggih.

Husein Parmawati (2019) menegaskan bahwa pembangunan, tergantung pada kriteria tertentu, dapat dilihat sebagai upaya memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kemajuan menuju keadaan yang lebih baik.

Menurut para ahli, pengembangan mencakup semua proses transformasi yang dilaksanakan melalui usaha-usaha yang disengaja dan terencana. Di sisi lain, implementasi merupakan taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Infrastruktur, menurut American Public Works Association (Ompusunggu, 2018), didefinisikan sebagai fasilitas fisik yang dibangun atau dibutuhkan oleh lembaga publik untuk mendukung fungsi pemerintah dalam menyediakan transportasi, pembuangan limbah, listrik, air, dan layanan lainnya yang mendukung tujuan sosial dan ekonomi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai sarana teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak

yang diperlukan untuk mendukung jaringan infrastruktur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar pembangunan sosial dan ekonomi dapat berjalan lancar. Peraturan Presiden tersebut mencantumkan kategori infrastruktur sosial dan ekonomi sebagai berikut:

- Infrastruktur transportasi;
- Infrastruktur jalan;
- Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- Infrastruktur air minum;
- Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat
- Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- Infrastruktur ketenagalistrikan;
- Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- Infrastruktur konservasi energi;
- Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- Infrastruktur fasilitas pendidikan;
- Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- Infrastruktur kawasan;
- Infrastruktur pariwisata;
- Infrastruktur kesehatan;
- Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan
- Infrastruktur perumahan rakyat

Pola Tata Ruang

Arsitektur tidak hanya mencakup bentuk dan tampilan bangunan, tetapi juga area tempat manusia melakukan aktivitas (Palupi & Lissimia, 2021). Salah satu faktor yang memengaruhi terciptanya pola atau struktur spasial adalah kebutuhan akan ruang publik dan privat. Ruang merupakan hasil dari kontak manusia dengan hal-hal yang mereka rasakan, yang dikendalikan oleh indera selain penglihatan, seperti penciuman, pendengaran, dan peraba. Aktivitas manusia juga terjadi di luar ruang tersebut. Ruang luar diciptakan dengan membatasi alam dan memisahkannya dari alam melalui penyediaan "bingkai," sehingga alam tidak dapat tumbuh tanpa batas. Area luar ruangan juga dapat dianggap sebagai bagian dari alam karena merupakan lingkungan eksterior buatan manusia dengan fungsi tertentu. Area yang tertutup oleh "bingkai" ketika kita melihat ke dalam dikenal sebagai ruang positif, yang berisi keinginan, fungsi, dan tujuan manusia.

Dua area, lantai dan dinding, membatasi ruang luar, atau mungkin dibatasi oleh dua komponen pembatas. Rob Krier menyatakan bahwa ada dua jenis ruang kota, yaitu:

1. Bentuknya linier, yang berarti area terbuka sering kali hanya memiliki batas samping, seperti batas yang berbatasan dengan bangunan, zona pejalan kaki, dan bangunan lainnya;
2. Bentuknya gugusan, yaitu suatu daerah terbuka yang dikelilingi batas-batas, seperti persegi, plaza, dan sebagainya.

Menurut Rapoport (1969), perencanaan tata ruang didefinisikan sebagai lingkungan fisik dengan hubungan organisasional antara berbagai hal dan orang yang terbagi dalam lokasi tertentu. Secara konseptual, perencanaan tata ruang menyoroti kegiatan-kegiatan yang saling terkait, seperti:

1) Proses pengalokasian kegiatan di suatu wilayah berdasarkan hubungan fungsional;
2) Proses memperoleh dan memadukan tatanan spasial antar berbagai bagian permukaan bumi, tempat berbagai kegiatan dilakukan, dengan bagian atas ruang dan bagian dalam yang mengandung berbagai sumber daya, sehingga perlu dipandang dari perspektif integratif; dan
3) Proses memperoleh ketersediaan fisik yang dapat memenuhi kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan, seperti merancang tempat kerja, tempat tinggal, transportasi, dan komunikasi.

Tiga komponen yang membentuk gagasan pola spasial adalah:

a. Ruang dan bagian-bagian komponennya, seperti bangunan dan area di sekitarnya;
b. Tatanan, yang menyiratkan komposisi dan pola atau model komposisi;
c. Model perencanaan tata ruang hunian, yang meliputi dimensi ruang, orientasi, dan hubungan spasial.

Desa Wisata

Desa wisata merupakan tatanan yang meliputi tempat penginapan, objek wisata, dan jasa penunjang, yang ditata sedemikian rupa sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat (Istiyani, 2019). Desa wisata memiliki ciri khas yang dikemas secara menarik dan alami untuk menarik minat wisatawan. Ciri khas tersebut dapat berupa kehidupan sosial budaya masyarakat setempat atau kekhasan fisik lingkungan alam pedesaan (Pariwisata, 2011).

Desa Wisata adalah tempat yang melestarikan lingkungan alam, ekosistem, dan pusat budaya tradisional masyarakat tanpa menghambat pertumbuhan penduduknya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.

Menurut Chafid Fandeli dalam Komariah (2017), desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki lingkungan lengkap dan mencerminkan keaslian desa. Selain memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata, potensi tersebut juga mencakup kehidupan sosial budaya, adat istiadat, kegiatan sehari-hari, arsitektur bangunan, dan tata ruang desa. Potensi ini meliputi penginapan, makanan dan minuman, cinderamata, objek wisata, serta kebutuhan lainnya.

Menurut sejumlah definisi, desa wisata adalah lokasi pedesaan yang memiliki potensi dan daya tarik, yang dapat dimanfaatkan sebagai tujuan wisata. Tujuan utama desa wisata adalah untuk meningkatkan perekonomian setempat dan mendorong pembangunan desa.

Pengembangan Pariwisata

Menurut Munasef (1995), pengembangan pariwisata terdiri dari semua tindakan dan usaha yang direncanakan untuk menarik pengunjung, serta menyediakan fasilitas, produk, dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan mereka.

Menurut Sugiama (2014), unsur pendukung pariwisata adalah unsur yang harus ada di suatu tempat wisata. Empat unsur tersebut dikenal dengan sebutan "4A" dalam pariwisata, yang meliputi *Attraction, Amenities, Ancilliary* dan *Accesibility.*

Teori alternatif yang dikemukakan oleh Buhalis (2000) menyatakan bahwa enam aspek penting bagi pertumbuhan pariwisata adalah atraksi, akomodasi, amenitas, layanan tambahan, aktivitas, dan aksesibilitas. Penulis penelitian ini menggunakan sintesis teoritis untuk mengembangkan keenam elemen tersebut: atraksi, akomodasi, amenitas, layanan tambahan, aktivitas, dan aksesibilitas.

- *Attraction* (Atraksi) adalah segala sesuatu yang dapat menarik minat wisatawan ke suatu destinasi wisata. Daya tarik ini menjadi hal pertama yang menarik perhatian wisatawan terhadap suatu tempat. Sumber daya alam, dengan atribut fisik dan daya tarik alami suatu daerah, dapat menjadi dasar bagi daya tarik tersebut. Selain itu, unsur budaya, termasuk artefak sejarah, kepercayaan agama, gaya hidup masyarakat, proses pemerintahan, dan adat istiadat masyarakat saat ini dan masa lalu, juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.
- *Accomodation* (Akses) Akomodasi yang dapat diakses dan layanan seperti persewaan mobil, transportasi lokal, serta rute atau pola perjalanan harus ditawarkan. Akses mencakup infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan pengunjung untuk mencapai lokasi wisata (Cooper et al., 2000).
- *Amenities* (Faslitas Pendukung) Wisatawan memerlukan berbagai fasilitas pendukung di tempat wisata, yang dikenal sebagai amenitas. Menurut Cooper dkk. (2000), amenitas meliputi berbagai fasilitas yang memenuhi permintaan penginapan, penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, tempat ritel, serta layanan lainnya, termasuk bank, rumah sakit, keamanan, dan asuransi.
- *Ancillary services* (Penginapan) Layanan tambahan, seperti penginapan, dapat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Hotel dengan berbagai fasilitas merupakan bentuk penginapan yang umum. Pilihan penginapan di komunitas wisata berbeda dengan pilihan di lokasi lain. Di kota wisata, penginapan sering disediakan di beberapa rumah penduduk setempat atau di unit-unit yang dibangun dengan konsep hunian tempat tinggal, yang terkadang disebut sebagai homestay.
- *Activity* (Aktivitas) berkaitan dengan kegiatan yang memberikan pengalaman bagi wisatawan di suatu lokasi. Setiap lokasi wisata menawarkan berbagai aktivitas, tergantung pada fitur yang ada di sana (Brown dan Stange, 2015). Aktivitas yang menjadi alasan pengunjung datang ke lokasi tersebut dikenal sebagai aktivitas wisata. Jenis kegiatan yang dilakukan di desa wisata berkorelasi dengan fitur yang ada di desa tersebut. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan di desa wisata adalah mengikuti rutinitas harian masyarakat setempat.
- *Accessibilities* (Layanan Pendukung) Organisasi, pemerintah daerah, lembaga, atau pengelola destinasi wisata menyediakan aksesibilitas (layanan pendukung) untuk membantu merencanakan kegiatan pariwisata (Cooper et al., 2000). Ancillary adalah perusahaan pengelola destinasi pariwisata, seperti yang dijelaskan oleh Wargenau dan Deborah dalam Sugiama (2011), yang mencakup operator tur, lembaga pemerintah, dan grup perjalanan, antara lain. Dalam hal ini, organisasi dapat berbentuk peraturan dan bantuan yang

ditawarkan oleh pemerintah atau entitas lain untuk mendukung kegiatan pariwisata. Hal serupa berlaku untuk desa wisata, di mana kebijakan pemerintah daerah dan nasional yang mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata turut membantu pembentukan desa wisata.

Pengembangan Desa Wisata

Rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia yang berfokus pada hal-hal berikut ini mencerminkan pembangunan kepariwisataan di Indonesia:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, serta pemerataan pertumbuhan industri kepariwisataan;
2. Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan untuk memberikan manfaat sosial budaya dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan;
3. Meningkatkan kepuasan pengunjung dan memperluas pangsa pasar;
4. Mewujudkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kepariwisataan Indonesia sebagai industri yang efektif, transparan, bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui lembaga yang bertanggung jawab *(accountable)*.

Menurut Pearce dalam Arida (2017), pengembangan desa wisata adalah proses yang mengutamakan metode untuk memajukan dan menumbuhkan masyarakat wisata. Proses ini melibatkan upaya melengkapi dan meningkatkan infrastruktur wisata guna memenuhi kebutuhan dan permintaan pengunjung. Adapun tujuan pengembangan kawasan desa wisata, sebagaimana dijelaskan oleh Gumelar (2010:5), adalah sebagai berikut:

1. Menentukan jenis pariwisata yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat setempat.
2. Memberikan kewenangan kepada masyarakat setempat untuk merencanakan dan mengelola lingkungan mereka.
3. Memastikan masyarakat setempat mendapatkan bagian yang wajar dari pendapatan terkait pariwisata serta berpartisipasi aktif dalam memilih jenis pariwisata yang memanfaatkan potensi lokal.
4. Mempromosikan kewirausahaan di kalangan masyarakat setempat.
5. Menghasilkan barang-barang terkait pariwisata untuk mendukung pengembangan desa wisata.

Pengembangan desa wisata merupakan upaya terpadu untuk melengkapi infrastruktur dan menyediakan layanan yang menunjang desa wisata, dengan tujuan meningkatkan jumlah pengunjung, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli di atas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode rasionalis yang didasarkan pada kebenaran dan teori empiris. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis guna memberikan temuan yang

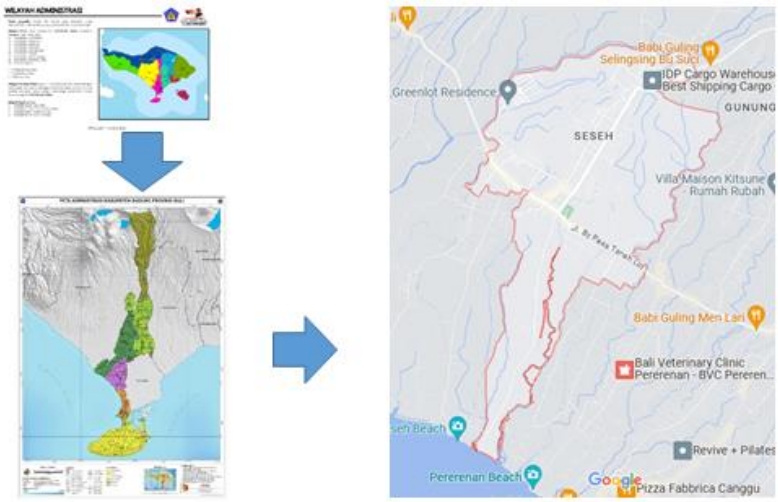
mendukung tujuan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel penelitian terdiri atas stakeholder utama yang memiliki pengaruh besar dan mampu memberikan informasi akurat berdasarkan pendapat serta kepentingan kelompok. Untuk menggambarkan karakteristik infrastruktur pendukung pariwisata di wilayah penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Desa Munggu

Desa Munggu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Keputusan Bupati Badung Nomor 200/041/HK/2022 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata. Desa Munggu mempunyai 13 (tiga belas) Banjar Dinas yakni Banjar Dinas Pemaron, Banjar Dinas Pemaron Delodan, Banjar Dinas Sedahan, Banjar Dinas Badung, Banjar Dinas Pengayehan, Banjar Dinas Gambang, Banjar Dinas Kerobokan, Banjar Dinas Pandean, Banjar Dinas Pasekan, Banjar Dinas Pempatan, Banjar Dinas Dukuh Sengguan, Banjar Dinas Dukuh Pandean, Banjar Dinas Pande Pemaron, Banjar Dinas Penataran Agung, Banjar Dinas Taman Sunia, Banjar Dinas Gegelang Melanting dan Banjar Dinas Dukuh Sengguan. Serta memiliki 3 (tiga) Desa Adat yakni Desa Adat Munggu, Desa Adat Pande Munggu dan Desa Adat Kertha Bujangga. Desa Munggu memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.597 Jiwa. Merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 16 meter diatas permukaan laut, terletak pada 8° 37′ 6.4″ S, 115° 7′ 41.84″ E. Luas wilayah Desa Munggu, adalah 20,43,34 Km². yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Desa Cepaka Kediri, Tabanan
- Sebelah Selatan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur Desa Tumbak Bayuh, Desa Pererenan Mengwi, Badung
- Sebelah Barat Desa Buwit, Kediri Tabanan, dan Desa Cemagi Mengwi Badung



Gambar 1. Lokasi Desa Munggu
Sumber : Dokumentasi pribadi (2023)

Pengembangan Kawasan Pariwisata

Penataan Pantai Munggu perlu dilakukan untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor pariwisata. Penilaian terhadap pertumbuhan infrastruktur pariwisata di Pantai Munggu, Desa Wisata Munggu, harus dilakukan secara bertahap. Pengembangan tersebut menggunakan enam dimensi pengembangan pariwisata, yaitu atraksi, akomodasi, amenitas, layanan tambahan, aktivitas, dan aksesibilitas.

1. *Attraction* (Atraksi)

   Mekotek, yang juga disebut Gerebeg, merupakan salah satu daya tarik wisata di Desa Munggu. Tradisi Mekotek menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dalam tradisi ini, puluhan hingga ratusan tongkat panjang disusun membentuk pola menyerupai limas. Bunyi "tek tek tek" yang berasal dari pertemuan ujung-ujung tongkat inilah yang menjadi asal mula istilah Kotekan. Selain tradisi Mekotek, Desa Munggu juga menawarkan berbagai kegiatan wisata, seperti wisata air (menunggang bebek di muara), wisata edukasi (les selancar), wisata berkuda, wisata olahraga (voli pantai), dan wisata terapi (pasir abu-abu untuk mengobati rematik). Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pelengkap yang mendukung daya tarik tradisi Mekotek.

2. *Accesbility* (Aksesbilitas)

   Layanan seperti penyewaan mobil, transportasi lokal, rute, atau pola perjalanan harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dalam mengakses lokasi wisata (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020). Pantai Munggu berjarak sekitar lima menit atau 2,75 kilometer dari rute utama, yaitu Jalan Raya Pererenan Tanah Lot. Pengunjung dapat menggunakan transportasi pribadi, seperti kendaraan roda dua atau roda empat, untuk mencapai lokasi wisata tersebut. Namun, kondisi jalan menuju Pantai Munggu masih buruk dan memerlukan perbaikan.



Gambar 2. Pintu Masuk Pantai Munggu
Sumber : Dokumentasi pribadi (2023)

3. *Amenities* (Fasilitas)

   Karena Pantai Munggu terletak sangat dekat dengan jalan raya utama, pengunjung dapat dengan mudah menemukan berbagai fasilitas pendukung,

seperti restoran, bank, ATM, klinik, tempat ibadah, supermarket, pasar tradisional, dan lainnya. Selain itu, tersedia tempat makan dan kios-kios kecil yang dikelola oleh penduduk setempat yang tinggal di sekitar tempat wisata tersebut. Namun, meskipun memiliki banyak fasilitas, Desa Wisata Munggu saat ini belum menyediakan toko suvenir.



Gambar 3. Fasilitas UMKM di Pantai Munggu
Sumber : Dokumentasi pribadi (2023)



Gambar 4. Fasilitas Parkir di Pantai Munggu
Sumber : Dokumentasi pribadi (2023)



Gambar 5. Fasilitas Pantai Munggu
Sumber : Dokumentasi pribadi (2023)

4. *Accomodation* (Akomodasi)

   Desa Munggu, khususnya di sekitar Pantai Munggu, menawarkan berbagai pilihan penginapan, seperti hotel, vila, homestay, dan wisma. Tersedianya penginapan ini menciptakan peluang bagi pemilik usaha atau masyarakat setempat untuk menyediakan fasilitas pendukung yang terkait dengan pariwisata. Menurut Munavizt (2010), penginapan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

   a. Penginapan komersial, yang dibangun dan dikelola secara eksklusif untuk tujuan memperoleh keuntungan maksimal;
   b. Penginapan semi-komersial, yang dibangun dan dikelola dengan tujuan sosial, seperti membantu masyarakat prasejahtera, sekaligus untuk tujuan komersial.
   c. Akomodasi nonkomersial merujuk pada penginapan yang dibangun dan dikelola untuk tujuan nonkomersial. Penginapan ini bertujuan melayani kelompok atau kalangan tertentu tanpa mengejar keuntungan finansial atau memberikan bantuan secara cuma-cuma.

5. *Activity* (Aktivitas)

   Pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan wisata di Desa Wisata Munggu, seperti kegiatan rekreasi, budaya, seni, serta kegiatan luar ruangan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan di Desa Munggu antara lain melukis dan mengikuti les gamelan.

6. *Ancillary Service* (Layanan Tambahan)

   Pokdarwis adalah penyedia jasa pariwisata di Pantai Munggu yang bergerak di bidang jasa penunjang di Desa Munggu, khususnya di wilayah Pantai Munggu. Selain menawarkan paket wisata kepada wisatawan, Pokdarwis juga mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam mempromosikan wisata Pantai Munggu, sehingga mereka juga dapat merasakan manfaatnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai, Pengembangan Infrastruktur Pantai Munggu Menuju Desa Wisata maka kesimpulan pada penelitian ini yakni Pemerintah Khususnya Pemerintah Kabupaten Badung telah mendukung dibuktikan dengan di keluarkannya aturan-aturan untuk mendukung desa wisata, di Pantai Munggu infrastruktur sudah tersedia. Rambu-rambu jalan yang belum tersedia, fasilitas amenitas yang masih sangat mendasar seperti tempat duduk, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan Pantai Munggu, semuanya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Untuk mendukung pertumbuhan pariwisata Pantai Munggu di masa depan, infrastruktur yang masih kurang, seperti kantor pusat, layanan, dan pusat cenderamata, harus segera dibangun.

Daptar Pustaka

Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2024). Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 3(3), 294–308.

Azizah, R. N. (2017). Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara). UIN Raden Intan Lampung.

Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, 9(4), 159–175.

Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(2), 157–170.

Istiyani, A. D. (2019). Menggali Potensi Desa Wisata: Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata. Hijaz Pustaka Mandiri.

Komariah, N., Yusup, P. M., Saepudin, E., & Rodiah, S. (2017). Pendidikan literasi lingkungan sebagai penunjang desa wisata agro Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 6(2), 111–115.

Manthofi, A., & Aisyah, S. (2024). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(4), 10214–10223.

Nomor, U.-U. (11 C.E.). tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Nurhajati, N. (2018). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (studi di desa mulyosari kecamatan pagerwojo kabupaten tulungagung). Publiciana, 11(1), 1–13.

Ompusunggu, V. M. (2018). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi), 3(2).

Palupi, D., & Lissimia, F. (2021). Kajian Konsep Arsitektur Perilaku pada Bangunan Rehabilitasi Narkoba Fan Campus Bogor. Sinektika: Jurnal Arsitektur, 18(2), 123–128.

Pariwisata, K. K. (2011). Undang-Undang republik indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Parmawati, R. (2019). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau. Universitas Brawijaya Press.

Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa Cendekia.

Riva'i, A. K. (2016). Komunikasi sosial pembangunan: Tinjauan teori komunikasi dalam pembangunan sosial. Hawa dan AHWA.

Siahaan, O. P., Latifah, S., & Afifuddin, Y. (2012). Perbandingan unit contoh lingkaran dan tree sampling dalam menduga potensi tegakan hutan tanaman rakyat pinus (studi kasus Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun). Peronema Forestry Science Journal, 1(1), 156440.

Sunarjaya, I. G., Antara, M., & Prasiasa, D. P. O. (2018). Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 4(2), 215–227.

Ulenaung, V. Y. (2019). Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Lex Administratum, 7(2).